PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT INDONESIA DI BIDANG PENDIDIKAN

JURNAL ILMIAH

Disusun oleh :

Ginanjar Agung Rahmadi
NIM. 175020104111006

JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2020

LEMBAR PENGESAHAN PENULISAN ARTIKEL JURNAL

Artikel Jurnal dengan judul :

PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT INDONESIA DI BIDANG PENDIDIKAN

Yang disusun oleh :

Nama	:	Ginanjar Agung Rahmadi
NIM	:	175020104111006
Fakultas	:	Ekonomi dan Bisnis
Jurusan	:	S1 Ilmu Ekonomi

Bahwa artikel Jurnal tersebut dibuat sebagai ***persyaratan ujian skripsi*** yang dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 30 Januari 2020

Malang, 30 Januari 2020

Dosen Pembimbing,

Prof. Dr. M. Pudjihardjo , SE., MS.

NIP. 195204151974121001

Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Kesejahteraan Masyarakat Indonesia di Bidang Pendidikan

Ginanjar Agung Rahmadi, M. Pudjihardjo
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
Email: ginanjar.agung@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari desentralisasi fiskal, yang diwakili oleh rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah, Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Belanja Daerah Fungsi Pendidikan, serta variabel lain yaitu PDRB per kapita dan Kemiskinan terhadap kesejahteraan masyarakat di bidang pendidikan yang diwakili Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Penelitian ini menggunakan analisis data panel dengan model Fixed Effect*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap RLS. Sedangkan DAK, dan Belanja Daerah Fungsi Pendidikan berpengaruh positif signifikan terhadap RLS. Dengan demikian, desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat bidang pendidikan. PDRB per kapita berpengaruh positif signifikan terhadap RLS, sedangkan Kemiskinan tidak berpengaruh signifikan terhadap RLS.*

Kata kunci: desentralisasi fiskal, PAD, DAK, Belanja Fungsi Pendidikan, PDRB per kapita, Kemiskinan, Rata-rata Lama Sekolah

A. PENDAHULUAN

Tujuan pembangunan di suatu negara adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di negara tersebut. Pendidikan adalah salah satu aspek pembangunan sosial dan ekonomi yang paling esensial karena pendidikan tidak hanya hak manusia tetapi juga sebuah alat untuk mengembangkan modal manusia dan mendukung pertumbuhan ekonomi (Bui dkk., 2019). Melalui pendidikan, sumber daya manusia akan menjadi lebih berkualitas dan memiliki kehidupan yang lebih baik.

Terdapat berbagai indikator yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan pendidikan. Salah satu indikator tersebut adalah Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Apabila ditelaah dari perbandingan dengan negara ASEAN lainnya pada Gambar 1, Indonesia hanya berada di peringkat ke-6 dalam kategori rata-rata lama sekolah. pertumbuhan angka RLS tidak cukup baik, yaitu rata-rata setiap tahun hanya 1,14%. Dengan kondisi seperti ini target RLS untuk tahun 2019 sebesar 8,8 tahun terancam tidak akan tercapai.

Gambar 1. RLS Negara-Negara ASEAN Tahun 2018

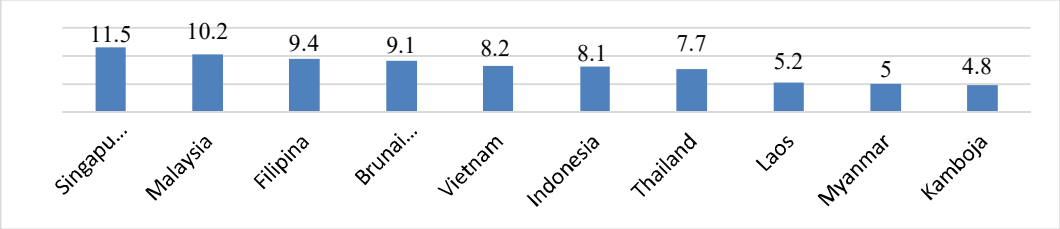

Sumber : UNDP, diolah

Sistem ekonomi Indonesia telah berubah dari sentralistik menjadi desentralistik untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, tidak terkecuali kesejahteraan di bidang pendidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa pendidikan merupakan salah satu urusan yang kewenangannya dibagi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pemerintah pusat berwenang dalam pengelolaan pendidikan tinggi, pemerintah daerah provinsi berwenang dalam pengelolaan pendidikan khusus dan menengah, sedangkan pemerintah kabupaten/

kota berwenang mengelola pendidikan usia dini, dasar dan non formal. Pelaksanaan desentralisasi diikuti dengan dengan penyerahan kewenangan terkait keuangan kepada daerah yang disebut desentralisasi fiskal, yaitu kewenangan penarikan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemberian dana transfer, kewenangan melakukan belanja daerah, dan kewenangan terkait pembiayaan daerah.

Meskipun kemandirian daerah masih dipertanyakan, jumlah PAD yang berhasil dihimpun oleh daerah menunjukkan peningkatan. Selain itu, pemerintah pusat juga menyalurkan Dana Perimbangan, khususnya Dana Alokasi Khusus (DAK), yang semakin meningkat setiap tahun sebagaimana disajikan pada Gambar 2.

Gambar 2. Perkembangan PAD dan DAK Provinsi di Indonesia (Triliun Rupiah)

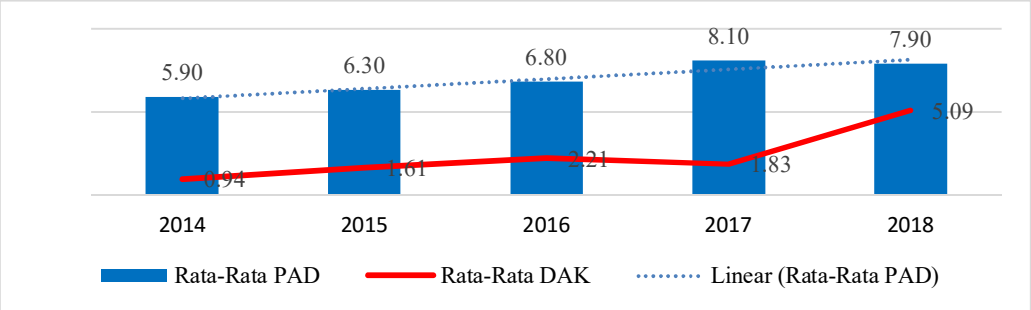

Sumber : DJPK, diolah

Pemerintah daerah harus melakukan belanja daerah memanfaatkan Pendapatan Daerah yang berhasil didapatkan. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2009 tentang Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pemerintah daerah wajib mengalokasikan 20% dana APBD untuk belanja fungsi pendidikan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di bidang pendidikan. Dari sisi realisasi, pemerintah daerah telah merealisasikan belanja publik di sektor pendidikan dalam jumlah yang semakin besar (Gambar 3)

Gambar 3. Rata-Rata Realisasi Belanja Daerah Fungsi Pendidikan Provinsi di Indonesia (Triliun Rupiah)

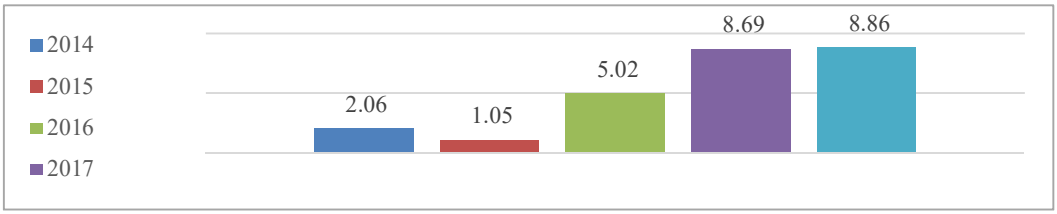

Sumber : DJPK, diolah

Ditinjau dari aspek ekonomi, Indonesia mampu menorehkan hasil positif yaitu kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita. PDRB per kapita meningkat cukup signifikan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (Gambar 4). Dalam periode 2014-2018, Indonesia mencatatkan kenaikan PDB per kapita sebesar Rp 14,1 juta per kapita atau sebesar 33,7%. Kenaikan ini mengindikasikan kenaikan daya beli masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup, termasuk pula untuk memenuhi biaya-biaya dalam memperoleh pendidikan formal.

Gambar 4. Perkembangan PDRB per Kapita Indonesia (Juta Rupiah)

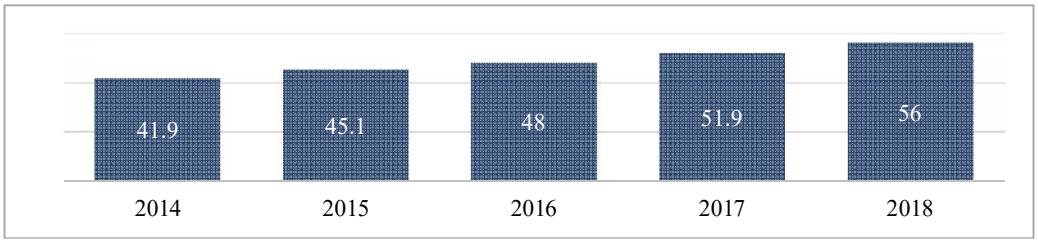

Sumber : DJPK, diolah

Pada tahun 2018, pemerintah menyatakan bahwa pengentasan kemiskinan menunjukkan hal yang positif, yaitu persentase penduduk miskin berhasil turun hingga di bawah 10%, tepatnya 9,66% (Gambar 5). Meskipun persentase penduduk miskin menunjukkan trend penurunan, namun kesenjangan pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan tidak mengalami perbaikan yang berarti. Hal tersebut ditunjukkan oleh Indeks Kedalaman Kemiskinan yang berkurang tidak signifikan, dari 1,75 (2014) menjadi 1,63 (2018). Semakin tinggi nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan dapat didefinisikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin jauh di bawah garis kemiskinan.

Gambar 5. Kemiskinan di Indonesia (2014-2018)

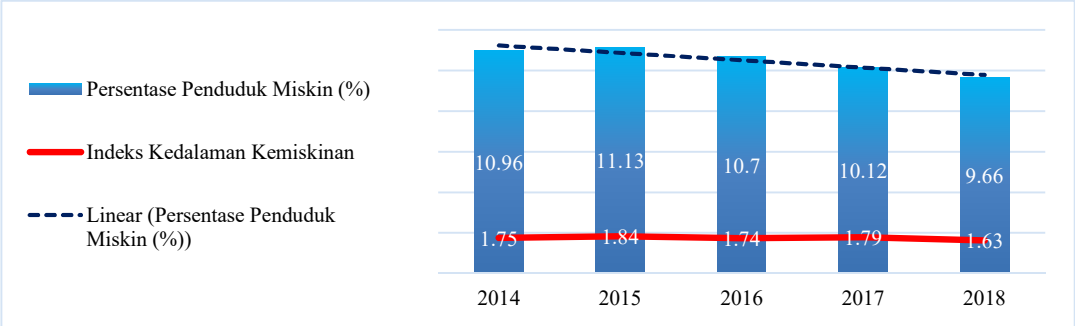

Sumber : BPS, diolah

Banyak studi telah dilakukan untuk mengetahui pengaruh desentralisasi fiskal terhadap kesejahteraan masyarakat dalam aspek pendidikan namun penelitian-penelitian tersebut menunjukkan hasil yang beragam. Sarkar (2000) tidak mampu menemukan pengaruh yang jelas antara desentralisasi fiskal terhadap peningkatan pembangunan manusia, khususnya dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Sedangkan penelitian yang dilakukan Ahmad (2016) menunjukkan bahwa rasio pajak daerah dan rasio pendapatan daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap rasio guru-murid. Sedangkan Jeong dkk. (2017) menyatakan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat penyelesaian sekolah menengah dan perguruan tinggi di Korea Selatan. Purwanto (2010) menyatakan bahwa di Indonesia DAU dan DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap angka partisipasi sekolah dasar namun negatif dan signifikan terhadap angka partisipasi SMP. DAK Fisik berpengaruh positif signifikan terhadap angka partisipasi SD dan SMP. Akan tetapi DAK Non Pendidikan berpengaruh negatif signifikan terhadap angka partisipasi sekolah. Sedangkan Muttaqin dkk. (2016) menjelaskan bahwa kapasitas fiskal dan status sebagai daerah pemekaran tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan RLS. Fadli dkk. (2019) menemukan bahwa belanja pemerintah bidang pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pendidikan di Provinsi NTB pada tahun 2010-2016. Kajian yang dilakukan DJPK (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan) menunjukkan hasil bahwa DAK, DAU dan DBH berpengaruh positif signifikan terhadap belanja fungsi pendidikan. Akan tetapi, Angka Partisipasi Murni lebih dipengaruhi oleh kemiskinan daripada realisasi belanja pendidikan.

B. KAJIAN PUSTAKA

Teori Federalisme Fiskal

Menurut Musgrave (1959) dalam Chandra (2012), fungsi pemerintah terbagi menjadi tiga, yaitu fungsi Distribusi, Stabilisasi, dan Alokasi. Fungsi Distribusi adalah fungsi pemerintah dalam mendistribusikan sumber-sumber ekonomi (pendapatan) kepada seluruh masyarakat. Sedangkan fungsi Stabilisasi merupakan fungsi pemerintah dalam menjamin dan menjaga stabilisasi perekonomian secara makro (agregat). Fungsi Alokasi bermakna bahwa pemerintah berperan dalam mengalokasikan sumber-sumber ekonomi yang ada kepada seluruh masyarakat. Berbeda dengan kedua fungsi tersebut, fungsi alokasi lebih sesuai dengan konsep desentralisasi (Chandra, 2012).

Desentralisasi diartikan sebagai pelimpahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang ada di dalamnya. Khusaini (2018) menyatakan secara umum konsep desentralisasi terdiri atas Desentralisasi Politik (*Political Decentralization*), Desentralisasi Administratif (*Administrative Decentralization*), Desentralisasi Ekonomi (*Economic or Market Decentralization*), dan Desentralisasi

Fiskal (*Fiscal Decentralization*). Teori yang mengedepankan desentralisasi fiskal sebagai kunci dalam pembangunan adalah teori Federalisme Fiskal. Menurut Musgrave (1959) dalam Silas (2017), peran pemerintah dalam memaksimalkan kesejahteraan sosial melalui penyediaan barang publik sebaiknya ditugaskan pada tingkatan pemerintahan yang lebih rendah, sesuai dengan prinsip efisiensi yang akan tercapai bila barang dan layanan publik disediakan oleh level pemerintahan yang terendah. Menurut Hayek (1945) proses pengambilan keputusan yang terdesentralisasi akan dipermudah dengan penggunaan informasi yang efisien karena pemerintah daerah lebih dekat dengan masyarakatnya *(allocative efficiency*). Tiebout (1956) memperkenalkan dimensi persaingan dalam pemerintah dan kompetisi antar daerah tentang alokasi pengeluaran publik sehingga memungkinkan masyarakat memilih berbagai barang dan jasa publik yang sesuai dengan selera dan keinginan mereka. Hal ini tidak terjadi jika pemerintah pusat bertindak sebagai penyedia barang dan jasa publik yang seragam.

Kebijakan publik terkait penyedaan layanan publik di bidang infrastruktur, pendidikan dan kesehatan, yang erat dengan kondisi daerah, akan lebih efektif bila dilakukan oleh pemerintah daerah daripada pemerintah pusat yang mengabaikan perbedaan kondisi geografis antarwilayah (Sarkar, 2000). Konsekuensinya, dalam sistem desentralisasi fiskal dimana pemerintah daerah memiliki peran yang lebih penting dari pemerintah pusat dalam penyediaan layanan publik, maka akan dihasilkan layanan publik yang lebih baik. Menurut Feruglio dan Anderson (2008) dalam Khusaini (2018), desentralisasi fiskal mengacu pada dimensi keuangan publik dari hubungan antar pemerintah. Desentralisasi fiskal meliputi beberapa hal, yaitu kewenangan perpajakan (*local taxing power*), keleluasaan untuk belanja (*expenditure asignment*), perencanaan, penetapan, dan pelaksanaan Anggaran (*budget discretion*), serta keleluasaan untuk mendanai investasi dengan melakukan peminjaman dan kerja sama pendanaan dengan pihak lain.

Desentralisasi Fiskal di Indonesia

Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah. Dengan demikian, kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan akhir dari pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia. Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tersebut, bidang pendidikan termasuk urusan pemerintahan konkuren, yaitu urusan pemerintahan yang kewenangannya dibagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota. Pemerintah pusat berwenang dalam pengelolaan pendidikan tinggi, pemerintah daerah provinsi berwenang dalam pengelolaan pendidikan khusus dan menengah, sedangkan pemerintah kabupaten/ kota berwenang mengelola pendidikan usia dini, dasar dan non formal.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan Pendapatan Daerah yang bersumber dari hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Pemerintah daerah diharapkan mampu mandiri melalui kontribusi PAD dalam Pendapatan Daerah yang semakin besar dan tidak tergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.

Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK digunakan khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapa standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. DAK dibagi 2 (dua), yaitu DAK Fisik dan DAK Nonfisik.

Belanja Daerah Fungsi Pendidikan

Belanja daerah fungsi pendidikan diatur secara khusus dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2009 tentang Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Anggaran belanja fungsi pendidikan berarti alokasi belanja fungsi pendidikan yang dianggarkan dalam APBD untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, termasuk gaji pendidik, namun tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan. Alokasi anggaran belanja fungsi pendidikan ditetapkan minimal 20% dari seluruh belanja

APBD. Dalam PMK Nomor 84/PMK.07/2009 disebutkan bahwa belanja fungsi pendidikan meliputi belanja modal, belanja barang, belanja pegawai, belanja bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja hibah.

Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB adalah semua barang dan jasa sebagai hasil dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang beroperasi di wilayah domestik, tanpa memperhatikan apakah faktor produksinya berasal dari atau dimiliki oleh penduduk daerah tersebut atau tidak (BPS). PDRB dapat mencerminkan kondisi perekonomian suatu daerah karena perekonomian dengan output barang dan jasa yang besar bisa secara lebih baik memenuhi permintaan rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah (Mankiw, 2007).

Kemiskinan

Menurut Laderchi dkk. (2003) dalam Sameti, Esfahani, dan Haghighi (2012), kemiskinan dari perspektif keuangan adalah kondisi pendapatan atau konsumsi seseorang yang berada di bawah batas minimal pendapatan/ konsumsi. Todaro dan Smith (2009) memaparkan bahwa kemiskinan absolut (dalam hal keuangan) mengacu pada jumlah orang yang tidak mampu mendapatkan sumber daya yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Orang-orang tersebut hidup di bawah tingkat pendapatan riil tertentu. Kemiskinan dari perspektif kapabilitas adalah ketidakmampuan seseorang dalam mencapai kemampuan dasar untuk memenuhi keberfungsian tertentu yang krusial pada level minimal (Saith, 2001; Sen, 1985, dalam Sameti, Esfahani, dan Haghighi, 2012). Streeten dkk. (1981) mengemukakan bahwa fungsi-fungsi dasar yang harus dicapai sebagai ukuran kehidupan yang layak adalah kesehatan, pendidikan, makanan, ketersediaan air, dan sanitasi.

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Salah satu indikator yang menggambarkan kesejahteraan masyarakat di bidang pendidikan dan digunakan dalam penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah Rata-rata Lama Sekolah (RLS)/ *Mean Years of School*. Menurut BPS, Rata-rata Lama Sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Semakin tinggi nilai RLS mengindikasikan bahwa masyarakat memiliki kesempatan dalam mengenyam pendidikan pada suatu negara.

C. METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Sesuai dengan masalah dan tujuan dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif asosiatif.

Tempat dan Waktu Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah seluruh provinsi di Indonesia, yaitu sebanyak 34 provinsi. Periode penelitian dimulai dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018.

Definisi Operasional Variabel

Untuk menghindari perbedaan penafsiran terhadap variabel yang digunakan dalam penelitian ini serta memberikan batasan yang jelas terkait variabel tersebut, maka perlu dipaparkan definsi operasional yaitu sebagai berikut ini :

1) *Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD)* : Rasio PAD merupakan rasio total realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) provinsi dan kabupaten/kota dalam provinsi tersebut terhadap realisasi total Pendapatan Daerah provinsi dan kabupaten/ kota dalam provinsi tersebut. Satuan dari variabel Rasio PAD adalah persen.
2) *DAK (Dana Alokasi Khusus)* : DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Variabel DAK dinyatakan dalam logaritma natural.
3) *Belanja Fungsi Pendidikan (BFP)* : Belanja fungsi pendidikan adalah belanja daerah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Variabel BFP dinyatakan dalam logaritma natural.
4) *Pendapatan Domestik Regional Bruto Per Kapita (PDRB per Kapita)* : PDRB adalah semua barang dan jasa sebagai hasil dari kegiatan ekonomi yang beroperasi di wilayah domestk tanpa

memperhatikan faktor produksinya berasal dari atau dimiliki oleh penduduk daerah tersebut (BPS). PDRB per kapita adalah nilai PDRB dibagi jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Penelitian ini menggunakan PDRB per kapita atas harga konstan tahun 2010. Variabel PDRB per kapita dinyatakan dalam logaritma natural.

5) *Persentase Penduduk Miskin* : Persentase penduduk miskin adalah persentase penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin (BPS).
6) *Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)* : Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Rata-rata Lama Sekolah (RLS), sebagai indikator yang mewakili kesejahteraan di bidang pendidikan. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)/ *Mean Years of School* didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal (BPS).

Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan metode analisis data panel dengan model *Fixed Effect*, sesuai dengan hasil uji Chow dan Hausman yang telah dilakukan. Model estimasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$\boldsymbol{RLS_{it} = \alpha + \beta_1 PAD_{it} + \beta_2 DAK_{it} + \beta_3 BFP_{it} + \beta_4 Ykap_{it} + \beta_5 PPM_{it} + \varepsilon_{it}}$$

Dimana :

RLS	=	Rata-rata Lama Sekolah
PAD	=	Rasio Pendapatan Asli Daerah dengan Pendapatan Daerah
DAK	=	Dana Alokasi Khusus (dalam logaritma natural)
BFP	=	Belanja Fungsi Pendidikan (dalam logaritma natural)
Ykap	=	Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita (dalam logaritma natural)
PPM	=	Persentase jumlah penduduk miskin
α	=	Konstanta
β (1..5)	=	Koefisien variabel bebas
ε	=	*error terms*

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Multikolinearitas

Berdasarkan hasil koefisien antarvariabel yang ditampilkan dalam Tabel 1, tidak terdapat koefisien korelasi antarvariabel independen yang lebih besar dari 0,85 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat unsur multikolinearitas dalam model tersebut.

Tabel 1. Hasil Korelasi antar Variabel Bebas

	PAD	DAK	BFP	Ykap	PPM
PAD	1,00000	-0,02257	0,378465	0,37836	-0,53717
DAK	-0,02257	1,00000	0,55246	-0,13829	0,224203
BFP	0,37846	0,55246	1,00000	0,11821	-0,106076
Ykap	0,37836	-0,13829	0,11821	1,00000	-0,333226
PPM	-0,53717	0,224203	-0,10607	-0,33322	1,00000

Sumber : Olah data Eviews 9

Uji Heterokedastisitas

Salah satu metode untuk mengetahui keberadaan unsur heterokedastisitas adalah dengan metode Glejser. Metode Glejser dilakukan dengan cara melakukan regresi nilai absolut residual dengan variabel independennya. Kemudian setiap variabel independen diuji *t* untuk mengetahui signifikansi terhadap residual absolut. Apabila nilai koefisien dari variabel independen tidak signifikan secara statistik terhadap residual absolut, maka disimpulkan tidak ada heteroskedastisitas. Jika nilai koefisien dari variabel independen signifikan secara statistik terhadap residual absolut, maka disimpulkan ada heteroskedastisitas.

Berdasarkan hasil regresi yang disajikan Tabel 2, dapat diketahui seluruh variabel bebas memiliki nilai *Prob.* yang lebih besar dari α (1%) sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi heterokedastisitas.

Tabel 2. Uji Signifikansi Parsial antara Variabel Independen dengan Residual Absolut

Variabel Dependen : Absolut residual

Variabel Independen	*Prob.*	Keterangan
PAD	0,4216	tidak terjadi heterokedastisitas
DAK	0,7780	tidak terjadi heterokedastisitas
BFP	0,1859	tidak terjadi heterokedastisitas
Ykap	0,1748	tidak terjadi heterokedastisitas
PPM	0,8887	tidak terjadi heterokedastisitas

Sumber : Olah data dengan Eviews 9

Uji Normalitas

Nilai *Prob.* dari uji normalitas adalah sebesar 0,708069 atau lebih besar dari α 1%, sehingga dapat disimpulkan bahwa residual dari model memiliki distribusi normal.

Koefisien Determinasi (R^2)

Berdasarkan hasil regresi *fixed effect,* nilai koefisien determinasi/ *R-squared* yang didapatkan adalah sebesar 0,9948. Nilai ini bermakna bahwa variabel PAD, DAK, BFP, Ykap dan PPM berkontribusi dalam menggambarkan 99,48% RLS. Sedangkan sisanya sebesar 0,52 persen dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak diikutsertakan dalam model.

Uji Simultan (Uji F)

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen secara bersama-sama (simultan) mempengaruhi variabel dependen. Hasil regresi *fixed effect* menunjukkan bahwa nilai *prob.F* sebesar 0,0000. Nilai *prob. F* tersebut lebih kecil dari nilai alpha 1% . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel PAD, DAK, BFP, Ykap dan PPM secara bersama-sama berpengaruh signifikan secara statistik terhadap variabel RLS.

Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Berdasarkan hasil regresi yang ditampilkan pada Tabel 3, dapat disimpulkan bahwa variabel PAD dan PPM tidak berpengaruh signifikan secara statistik terhadap RLS. Sedangkan DAK, BFP, dan Ykap tidak berpengaruh signifikan secara statistik terhadap RLS.

Tabel 3. Hasil Regresi Fixed Effect

Dependent Variabel : RLS

Variable	*Coefficient*	*Std. Error*	*t-Statistic*	*Prob.*	*Keterangan*
C	-22,58445	2,567626	-8,795851	0,0000	Signifikan
PAD	0,079285	0,234769	0,337715	0,7361	Tidak Signifikan
DAK	0,086283	0,014495	5,952707	0,0000	Signifikan
BFP	0,032566	0,008885	3,665187	0,0004	Signifikan
Ykap	1,587009	0,162248	9,781361	0,0000	Signifikan
PPM	-1,025190	1,272171	-0,805859	0,4218	Tidak Signifikan

Sumber : Olah data dengan Eviews 9

Keterangan : alpha (α) 5%

Persamaan Ekonometrika

Sesuai dengan hasil regresi *fixed effect* tersebut, maka persamaan ekonometrika yang didapatkan adalah sebagai berikut :

$$\mathbf{RLS_{it} = -22{,}58445 + 0{,}079\ PAD + 0{,}086\ DAK + 0{,}032BFP + 1{,}587\ logYkap - 1{,}025\ PPM + \varepsilon_{it}}$$

Pengaruh Rasio PAD terhadap RLS

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Rasio PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap RLS. Apabila ditinjau dari tanda koefisien, maka PAD searah dengan RLS. Pengaruh Rasio PAD yang tidak signifikan disebabkan oleh masih rendahnya PAD yang berhasil dihimpun oleh pemerintah daerah secara relatif bila dibandingkan dengan total Pendapatan Daerah. Dalam periode 2014-2018, PAD yang berhasil dihimpun daerah-daerah di Indonesia hanya mampu menyumbang 19,4% dari

keseluruhan Pendapatan Daerah. Rendahnya kontribusi PAD berdampak pada kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai belanja daerah.

Sebagian besar provinsi-provinsi di Indonesia masih sangat bergantung pada kucuran dana transfer dari pemerintah pusat untuk mendanai belanja daerah. Hal tersebut dikuatkan oleh penelitian dari Artati dan Wahyuni (2016) dan Subadriyah (2017). Artati dan Wahyuni (2016) menyatakan bahwa terjadi *flypaper effect* pada pengeluaran fungsi pendidikan daerah di Indonesia atau dengan kata lain kenaikan belanja daerah fungsi pendidikan cenderung lebih distimulus oleh kenaikan dana transfer daripada kenaikan PAD. Subadriyah (2017) juga menemukan bahwa di Jawa Tengah sumber pendanaan belanja daerah cenderung berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) bukan PAD. Hal tersebut menunjukkan tingkat kemandirian daerah yang masih rendah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian dari Muttaqin dkk. (2016), Wu (2019) dan Mtzigaya (2019). Penelitian Muttaqin dkk. (2016) menunjukkan bahwa kapasitas fiskal dan status sebagai daerah pemekaran tidak berpengaruh signifikan terhadap RLS. Wu (2019) memaparkan bahwa desentralisasi fiskal, baik dalam hal pendapatan maupun pengeluaran, tidak berpengaruh signifikan terhadap penyediaan barang publik, yaitu pendidikan dasar. Mtasigazya (2019) juga menyatakan bahwa desentralisasi fiskal tidak mampu mempengaruhi layanan pendidikan dasar di daerah Dodoma, Tanzania akibat masih rendahnya pendapatan asli daerah dan dana transfer dari pemerintah pusat sehingga daerah tersebut tidak mampu memenuhi layanan pendidikan dasar.

Pengaruh DAK terhadap RLS

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa DAK berpengaruh positif signifikan terhadap RLS. Hasil regresi menunjukkan bahwa peningkatan 1% DAK akan diikuti dengan peningkatan RLS sebesar 0,086 tahun *ceteris paribus.* Hal ini sesuai dengan teori Federalisme Fiskal yaitu dana transfer merupakan salah satu pilar penting dalam implementasi desentralisasi fiskal dan mendorong efisiensi layanan publik dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

DAK Fisik digunakan untuk membangun infrastruktur di daerah berupa jalan, jembatan, maupun infrastruktur yang berkaitan langsung dengan bidang pendidikan, misalnya sekolah dan ruang kelas. Pada tahun 2016, jumlah SMP di Indonesia mencapai 22.803 sekolah dan meningkat menjadi 23.386 sekolah pada 2018. Sedangkan di level SMA, jumlah sekolah meningkat dari 10.001 sekolah menjadi 10.394 dalam periode yang sama. Peningkatan jumlah sekolah berdampak pada peningkatan akses pendidikan formal.

Infrastruktur non pendidikan seperti jalan dan jembatan yang dibangun mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat. Masyarakat yang memiliki pendapatan lebih baik akan lebih mudah dalam mengakses layanan pendidikan. Keberadaan infrastruktur tersebut memudahkan masyarakat dari daerah terpencil untuk mengakses fasilitas pendidikan formal.

Penelitian lain yang menyimpulkan hal yang sama adalah Purwanto (2010) dan Sarkar (2000). Purwanto menyimpulkan bahwa DAK Pendidikan berpengaruh positif signifikan terhadap angka partisipasi murni, baik di level sekolah dasar maupun menengah pertama. Sarkar (2000) menemukan hasil bahwa rasio *conditional transfer* terhadap total transfer memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah partisipasi di tingkat SMP per 1000 siswa SD.

Pengaruh Belanja Fungsi Pendidikan terhadap RLS

Hasil regresi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Belanja Fungsi Pendidikan berpengaruh positif signifikan terhadap RLS. Koefisien dari variabel Belanja Fungsi Pendidikan menunjukkan bahwa kenaikan 1% Belanja Fungsi Pendidikan berdampak pada peningkatan RLS sebesar 0,032 tahun *ceteris paribus.* Temuan ini mendukung Teori Federalisme Fiskal, bahwa melalui desentralisasi fiskal, salah satunya yaitu desentralisasi belanja, akan mendorong perbaikan layanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hasil temuan ini sesuai dengan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan Baldacci dkk. (2004) yang menyatakan bahwa belanja pendidikan dan kesehatan memiliki dampak yang positif dan signifikan terhadap akumulasi modal kesehatan dan pendidikan masyarakat. Peningkatan 1% rasio belanja pendidikan terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) berkaitan dengan kenaikan 6% angka partisipasi sekolah tahun tersebut dan 3% pada tahun berikutnya. Penelitian dari Heredia-ortiz (2007) juga memaparkan bahwa desentralisasi belanja di bidang pendidikan (rasio belanja daerah bidang

pendidikan terhadap total belanja pendidikan) dapat memperbaiki tingkat pengulangan (*repetition rates*), tingkat *dropout,* tingkat penyelesaian sekolah dan skor tes pada level sekolah dasar (*primary*).

Pengaruh Pendapatan Domestik Bruto (PDRB) Per Kapita terhadap RLS

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Domestik Bruto Per Kapita berpengaruh positif signifikan terhadap Rata-rata Lama Sekolah. Apabila PDRB per kapita meningkat 1% akan berdampak pada peningkatan RLS sebesar 1,59 tahun *ceteris paribus.* Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian dari Baldacci dkk. (2004) yaitu bahwa semakin tinggi tingkat pendapatan dan tingkat modal manusia dapat mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi sehingga modal manusia akan kembali meningkat. Purusa and Sasana (2013) menyatakan bahwa peningkatan PDRB per kapita menurut harga berlaku berpengaruh positif signifikan terhadap angka partisipasi murni SD/MI.

Peningkatan pendapatan per kapita mengindikasikan semakin meningkatkan kemampuan keluarga dalam menyekolahkan anaknya. Pendidikan dapat membantu suatu keluarga keluar dari kemiskinan dengan peningkatan pendapatan melalui peningkatan produktivitas, baik sebagai usaha mandiri maupun sebagai pekerja dengan pendapatan yang lebih tinggi (UNDP). Dengan demikian hal tersebut merupakan suatu kesinambungan antara peningkatan pendapatan dan peningkatan pendidikan.

Pengaruh Kemiskinan terhadap RLS

Hasil regresi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kemiskinan tidak berpengaruh signifikan terhadap Rata-rata Lama Sekolah. Tanda negatif pada koefisien variabel kemiskinan menunjukkan bahwa penurunan kemiskinan diikuti oleh kenaikan rata-rata lama sekolah. Pengaruh yang tidak signifikan ini disebabkan adanya kucuran bantuan pendidikan dari pemerintah bagi anak yang berasal dari keluarga miskin melalui Program Indonesia Pintar (PIP). Setiap siswa miskin menerima bantuan tunai yaitu bagi siswa SD/MI/Paket A sebesar Rp 450.000,00/tahun, siswa SMP/MTS/Paket B sebesar Rp 750.000/tahun, dan siswa SMA/SMK/Paket C/Kursus dan Pelatihan memperoleh bantuan senilai Rp 1.000.000,00/tahun. Jumlah siswa penerima manfaat dari PIP meningkat dari tahun 2014 sebesar 7,95 juta jiwa menjadi 18,7 juta jiwa pada tahun 2018. Hal tersebut menunjukkan cakupan PIP dalam menjangkau siswa dari keluarga miskin semakin besar.

Kemendikbud mencatat bahwa sampai dengan bulan Agustus 2019, dana PIP yang telah disalurkan secara akumulasi adalah sebesar Rp 35.740.676.660.000. Disalurkannya bantuan tunai tersebut mampu meringankan beban biaya yang harus dikeluarkan siswa, seperti biaya transportasi, pembelian buku dan alat tulis, ataupun pembelian seragam dan kelengkapan sekolah. Kesulitan dana yang dialami anak dari keluarga miskin untuk mendapatkan akses pendidikan formal sering menjadi hambatan yang menyebabkan anak dari keluarga miskin keluar atau tidak melanjutkan sekolah.

Hasil penelitian ini memperkuat temuan Suryadarma (2010) yang mengemukakan bahwa kemiskinan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat penyelesaian sekolah di tingkat SMP. Hasil penelitian Sparrow (2004) menunjukkan bahwa program beasiswa dapat membantu meningkatkan tingkat partisipasi sekolah dasar bagi anak-anak yang berasal dari keluarga miskin. Cameroon (2009) juga menyatakan bahwa program beasiswa mampu mengurangi tingkat *drop-out* pada level SMP, dimana anak sekolah paling rentan keluar dari sekolah pada level SMP. Bui dkk. (2019) menyatakan bahwa kebijakan pengurangan biaya sekolah dan subsidi bagi pelajar di Vietnam berpengaruh positif signifikan dalam peningkatan angka partisipasi sekolah dasar dan menengah.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah berpengaruh tidak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di bidang pendidikan yang diwakili oleh Rata-rata Lama Sekolah.
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Rata-rata Lama Sekolah.
3. Belanja Fungsi Pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Rata-rata Lama Sekolah.
4. Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) bruto per kapita mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap angka Rata-rata Lama Sekolah.

5. Kemiskinan, yang diwakili oleh persentase penduduk miskin, berpengaruh tidak signifikan terhadap Rata-rata Lama Sekolah.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dan pembahasan yang telah dipaparkan, beberapa saran yang dapat disampaikan untuk meningkatkan kesejahteraan di bidang pendidikan adalah sebagai berikut :

1. Meskipun Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah berpengaruh tidak signifikan, pemerintah daerah tetap perlu mendorong peningkatan kemandirian daerah dan tidak bergantung terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Dengan PAD yang semakin melimpah pemerintah daerah memiliki kemampuan untuk membiayai belanja daerah dan tidak tergantung dengan dana transfer. Ketergantungan terhadap dana transfer yang semakin menurun memberikan keleluasan kepada pemerintah pusat untuk mengalokasikan dana yang tersedia untuk pembangunan di berbagai bidang lain. Di samping itu, tekanan fiskal dan defisit anggaran pemerintah pusat dapat berkurang melalui berkurangnya dana transfer ke daerah.
2. Alokasi DAK seharusnya mendapatkan porsi yang lebih besar daripada dana transfer yang lain, seperti DAU dan DBH yang merupakan *unconditional grants* atau dana transfer yang bebas digunakan oleh pemerintah daerah. Melalui kucuran DAK, pembangunan daerah dapat diarahkan untuk mencapai tujuan, yaitu kesejahteraan masyarakat, terutama kesejahteraan di sektor pendidikan.
3. Pemerintah daerah seharusnya mengalokasikan proporsi anggaran yang lebih besar dari ketentuan yang diamanatkan dalam undang-undang, yaitu sebesar 20%. Peningkatan dan perbaikan sekolah, ruang kelas, peralatan belajar mengajar merupakan kunci peningkatan pendidikan. Selain itu, peningkatan kesejahteraan guru dapat menjaga fokus guru dalam mendidik siswa sehingga berdampak pada peningkatan angka Rata-rata Lama Sekolah.
4. Peningkatan pendapatan per kapita harus diikuti dengan upaya pemerataan pendapatan melalui peningkatan lapangan kerja serta pemberian subsidi bagi masyarakat miskin. Dengan peningkatan pendapatan yang diikuti ketimpangan yang semakin rendah, kesempatan masyarakat dalam mengenyam pendidikan formal akan semakin besar.
5. Pengentasan kemiskinan harus tetap menjadi prioritas utama pembangunan karena apabila suatu keluarga terlepas dari jerat kemiskinan maka anak tidak mengalami tekanan untuk bekerja sehingga berdampak pada masa sekolah yang lebih lama. Program bantuan kepada siswa dari keluarga miskin dan daerah tertinggal patut dilanjutkan karena melalui bantuan tersebut peserta didik dapat memenuhi biaya-biaya tidak langsung dalam memperoleh akses pendidikan seperti biaya transportasi.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, Iftikhar. 2016. Assessing the Effects of Fiscal Decentralization on the Education Sector: A Cross-Country Analysis. *The Lahore Journal of Economics*, Vol. 21, No. 2: 53–96. https://doi.org/10.35536/lje.2016.v21.i2.a3.

Artati, Y. Wilda, Wahyuni, Ribut N.T. 2016. Fenomena Flypaper Effect pada Pengeluaran Pemerintah Fungsi Pendidikan di Indonesia.*Jurnal BPPK*, Vol. 9, No.2: 146-159.

Baldacci, E., dkk. 2004. Social Spending, Human Capital, and Growth in Developing Countries. *IMF Working Papers*. doi: 10.1016/j.worlddev. 2007.08.003.

BPS. Kemiskinan dan Ketimpangan. Diakses dari https://www.bps.go.id/subject/ 23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html, pada 08 Desember 2019.

BPS. Pendapatan Domestik Regional Bruto. Diakses dari https://www.bps.go.id/ subject/52/produk-domestik-regional-bruto--lapangan-usaha-.html, pada 07 Desember 2019.

BPS. Rata-rata Lama Sekolah (MYS). Diakses dari https://sirusa.bps.go.id/sirusa/ index.php/indikator/572, pada 08 Desember 2019.

BPS. 2018. Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi 2007-2019. Diakses dari https://www.bps.go.id/dynamictable/2016/08/18/1219/persentase-pen-duduk-miskin-menurut-provinsi-2007---2019. html, pada 01 Januari 2020.

BPS. 2018. *Rata-rata Lama Sekolah Menurut Provinsi 2010-2018 (Metode Baru).* diakses dari https://www.bps.go.id/dynamictable/2019/04/16/1613/rata-rata-lama-sekolah-menurut-provinsi-2010-2018-metode-baru-.html, pada 01 Ja-nuari 2020.

BPS. 2018. (Seri 2010) Produk Domestik Regional Bruto per Kapita atas Dasar Harga Berlaku menurut Provinsi 2010-2018 (Ribu Rupiah). Diakses dari https://www.bps.go.id/dynamictable/2015/10/07/957/-seri-2010-produk-domestik-regional-bruto-per-kapita-atas-dasar-harga-berlaku-menurut-provinsi-2010-2018-ribu-rupiah-.html, pada 01 Januari 2020.

Bui, T. Ahn, Nguyen, C. Viet, Nguyen, K. Duc, dan Nguyen, H. Hong. 2019. The Effect of Tuition Fee Reduction and Education Subsidy on School Enrollment: Evidence from Vietnam. *Children and Youth Services Review*. Vol. 108. https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2019.104536

Cameroon, L. 2009. Can a public scholarship program successfully reduce school drop-outs in a time of economic crisis? Evidence from Indonesia*. Economics of Education Review,Vol.28:308–317.* doi:10.1016/j.econedurev.2007.09.013

Chandra, Prakash. 2013. Theory of Fiscal Federalism : An Analysis. *MPRA Munich Personal RePec Archive*, (No. 41769), https://mpra.ub.uni-muen chen.de /41769/.

Heredia-ortiz, E. 2007. The Impact of Education Decentralization on Education Output : A Cross-Country Study. *Georgia State University*. Diakses online pada : https://scholarworks. gsu.edu/econ_diss.

Jeong, Dong Wook, Ho Jun Lee, and Sung Kyung Cho. 2017. Education Decentralization, School Resources, and Student Outcomes in Korea. *International Journal of Educational Development,* Vol. 53: 12–27. https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2016.12.003.

Khanal, Gopi K. 2018. Fiscal Decentralization and Human Poverty in Nepal : A Causal Analysis. *Journal of Mangement and Development Studies* : 1-15.

Khusaini, Moh. 2018. *Keuangan Daerah.* Malang: UB Press.

Kementerian Luar Negeri. Geografi. diakses dari https://kemlu.go.id/astana/ id/pages/geografi/41/etc-menu, pada 31 Desember 2019

Mankiw, Gregory. 2007. *Makroekonomi*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Mtasigazya, Paul. 2019. Fiscal Decentralization Reform and its Impacts on Primary Education Service Delivery in Tanzania: the Case of Dodoma Municipal Council. Journal of the Institute for African Studies. doi: 10.31132/2412-5717-2019-48-3-30-48.

Muttaqin, T., M. van Duijn, L. & Heyse, dan Wittek R. 2016. The Impact of Decentralization on Educational Attainment in Indonesia. *Springer* : 79–103. https://doi.org/10.1007/978-3-319-22434-3_4.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 2019. Jakarta: Kementerian Keuangan.

Purusa, M. S. dan Sasana, H. 2013. Implikasi Desentralisasi Fiskal Terhadap AKABA dan APM SD/MI Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2010. *Diponegoro Journal of Economics*, 2, pp. 1–12.

Purwanto, Deniey Adi. 2010. Decentralization and Its Impact on Primary Education Outcomes. *Journal of Indonesian Economy and Business*, Vol. 25 (No.1): 41–58.

Sameti, Majid & Esfahani, Rahim & Haghighi, Hassan. 2012. Theories of Poverty: A Comparative

Analysis. *Kuwait Chapter of Arabian Journal of Business and Management Review*, Vol. 1 (No.6).

Sarkar, Mainak. 2000. Fiscal Decentralization and Human Development : Some Evidence from Argentina.

Sarkoro, H., & Zulfikar. 2016. Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi se-Indonesia Tahun 2012-2014). *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*.

Sow, Moussé, dan Ivohasina Razafimahefa. 2015.Fiscal Decentralization and the Efficiency of Public Service Delivery. *IMF Working Papers*, Vol.15 (No. 59): 1. https://doi.org/10.5089/9781484351116.001.

Sparrow, R. 2007. Protecting Education for the Poor in Times of Crisis: An Evaluation of a Scholarship Programme in Indonesia. *Oxford Bulletin of Economics and Statistics.* Vol. 69(1): 99–122. doi:10.1111/j.1468-0084. 2006.00438.x

Subadriyah. 2017. Flypaper Effect: Sebelum dan Sesudah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Akrual. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Vol.8, No.3: 559-570.

Suryadarma, D., dan Suryahadi, A. 2010. Determinants of Education Attainment in Developing Countries : Can Higher Skills Compensate for Poverty?. diakses online pada: https://www.rand.org/content/dam/rand/www/external/labor/FLS/IFLS/papers/2010_suryadarma-2.pdf.

Sutrisno, E. 2009. Analisis Pencapaian Rata-Rata Lama Sekolah dan Angka Melek Huruf di Provinsi Lampung 2003-2007. Tesis: Universitas Gajah Mada.

Syahril, Ilhami. 2014. Analisis Pengaruh Anggaran Pendidikan Terhadap IPM Di Indonesia. Tesis. Bogor: Institut Pertanian Bogor.

Taufiq, Ahmad Burhanudin. 2010. Analisis Belanja Publik dan Penerapan Standard Costing pada Manajemen Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU). Tesis. Jakarta: Universitas Indonesia.

Todaro, Michael P. dan Smith, Stephen C. 2011. *Pembangunan Ekonomi Edisi Kesebelas Jilid I.* Jakarta: Penerbit Erlangga.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. 2014. Jakarta: Kementerian Keuangan

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2009. Jakarta : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah. 2004. Jakarta: Kementerian Keuangan.

Widarjono, Agus. 2017. *Ekonometrika.* Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Wu, A. M. 2019. The Logic of Basic Education Provision and Public Goods Preferences in Chinese Fiscal Federalism. *PLOS One Journal*. pp. 1–16. doi: 10.1371/journal.pone.0225299.